

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejarah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II membuat Jepang mengalami kehancuran dan mau tidak mau Jepang menerima bantuan luar negeri demi rekonstruksi negaranya. Melalui program *Government and Relief in Occupied Area* (GARIO) dan *Economic Rehabilitation in Occupied Areas* (EROA) dimana Amerika Serikat sebagai negara donor telah menempatkan Jepang sebagai penerima bantuan luar negeri pertama kali dalam kurun waktu dari tahun 1945 sampai 1951. Anggaran sejumlah USD 880 juta diterima oleh Jepang setelah bergabung dengan World Bank pada tahun 1952. (Raymon, 2009)

Jepang yang saat ini merupakan negara maju, dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, teknologi canggih, bahkan menjadi negara donor terbesar di dunia pada tahun 1989. Bantuan luar negeri Jepang pertama kali di inisiasi pada pertemuan Komite Penasehat Colombo yang dilaksanakan pada tahun 1954. Pada tahun 1950-an menjadi awal bagi keberlangsungan bantuan luar negeri Jepang kepada negara-negara di Asia sebagai usaha ganti rugi, penanggungjawab serta perbaikan atas korban-korban Perang Dunia II.

Bantuan luar negeri Jepang yang disebut dengan *Official Development Assistance* (ODA), merupakan sebuah kebijakan bantuan luar negeri terhadap negara-negara berkembang yang bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi perdamaian dan pembangunan sosial ekonomi negaranya yang dibagi ke dalam tiga jenis bantuan yaitu, pinjaman yen, dana hibah, dan bantuan teknis. Kebijakan bantuan ODA Jepang

dibagi menjadi dua jenis yaitu bantuan multilateral dan bilateral. Bantuan multilateral terdiri dari pembiayaan dan kontribusi keuangan kepada organisasi internasional, sedangkan bantuan bilateral diberikan dalam tiga jenis, yaitu : kerjasama teknis, bantuan pinjam dan bantuan hibah, termasuk pengiriman sukarelawan.

Bentuk bantuan ODA yaitu pinjaman yen, adalah pinjaman dana dengan persyaratan ringan yaitu suku bunga jangka panjang dan jauh lebih rendah, hal ini dilakukan untuk mendukung upaya negara-negara berkembang untuk maju dengan menyediakan modal yang diperlukan untuk pembangunan. Bentuk bantuan pinjaman yen ini digunakan untuk membangun infrastruktur dasar dan menata fondasi sosial ekonomi di negara-negara berkembang. Bantuan dana hibah, adalah bantuan yang tidak diwajibkan untuk membayar kembali dana yang diberikan, dengan menyediakan dana yang diperlukan untuk mempromosikan pembangunan sosial ekonomi dalam bentuk kerjasama keuangan dengan negara-negara berkembang. Khususnya di negara-negara berkembang dengan tingkat pendapatan rendah. Alokasi bantuan hibah yaitu untuk pembangunan rumah sakit, jembatan dan infrastruktur sosial ekonomi lainnya, serta mempromosikan pendidikan, program HIV/AIDS, kesehatan anak-anak dan kegiatan lingkungan, yang secara langsung mendukung peningkatan standar kehidupan di negara tersebut. Sedangkan, kerjasama teknis, adalah kerjasama yang diberikan untuk membantu pengelolaan dan pengembangan SDM di negara-negara berkembang. Kerjasama ini lebih mengacu pada teknologi yang dimiliki Jepang, pengetahuan dan pengalaman untuk memelihara sumber daya manusia yang mempromosikan pembangunan sosial ekonomi di negara-negara berkembang. Kerjasama teknis mencakup penerimaan peserta pelatihan, pengiriman tenaga ahli, penyediaan peralatan dan implementasi studi yang bertujuan untuk mendukung pembuatan kebijakan dan perencanaan proyek pekerjaan umum. Bentuk penerimaan dan pengiriman tenaga ahli dan relawan untuk mendapatkan

pelatihan di berbagai sektor, yaitu sektor industri, transportasi, pertanian, perkebunan, perikanan, kesehatan, kebersihan, informasi dan komunikasi, penanggulangan bencana dan governance. (jica.go.jp, 2015)

Negara-negara penerima kebijakan bantuan luar negeri Jepang tersebar di berbagai kawasan, diantaranya kawasan Eropa yang ditujukan untuk negara Albania dan Ukraina, kawasan Timur Tengah yang ditujukan untuk negara Saudi Arabia, Kuwait, dan Israel, kawasan Amerika Latin yang ditujukan untuk negara Uruguay, kawasan Afrika yang ditujukan untuk negara Ethiopia, kawasan Asia Selatan yang ditujukan untuk negara Bangladesh dan India dan kawasan Asia Tenggara yang ditujukan kepada hampir semua negara anggota ASEAN. (Palendra, 2018)

Dari sejumlah ODA yang disalurkan Jepang di wilayah Asia, Asia Tenggara menjadi kawasan yang paling banyak menerima ODA Jepang, terutama bantuan yang sifatnya bilateral. Asia Tenggara merupakan wilayah yang mempunyai kekayaan alam yang mana ini merupakan salah satu kawasan yang vital bagi keberlangsungan industri Jepang karena letak geografis dan potensi pasar yang dimilikinya, serta sumber-sumber bahan mentah ataupun juga berbagai sumber yang dimilikinya seperti gas, minyak bumi, gas alam, serta batu bara. (Subagyo, 2005)

Namun, krisis finansial pada tahun 1997 di kawasan Asia yang merupakan dampak dari Thailand pada saat itu dengan jatuhnya nilai Bath Thailand atas Dollar AS sebesar lebih dari 48 persen, kemudian menyebar ke negara-negara sekitarnya (Raymon, 2009). Sehingga membuat ODA Jepang mengalami penurunan dari segi kuantitas, disebabkan karena krisis ekonomi pada saat itu dan juga adanya tekanan dari negara-negara OECD yang mendesak Jepang untuk memperbaiki proporsi ODA-nya. OECD (*Organization For Economic Cooperation and Development*) merupakan organisasi yang menangani permasalahan bantuan luar negeri.

Jepang merupakan salah satu anggota OECD bersama dengan 35 negara anggota yang tergabung didalamnya. Negara-negara anggota OECD mendesak perubahan dalam ODA Jepang, yang semula lebih kepada kuantitas menjadi lebih kepada kualitas, dengan lebih tertuju kepada sektor-sektor permasalahan kemiskinan, lingkungan, ataupun nilai-nilai universal seperti Hak Asasi Manusia, demokrasi, demokratisasi dan lainnya.

Pada dasarnya ODA Jepang memiliki beberapa tahap perkembangan, yaitu: Pertama, pada tahun 1946-1951, dimana dalam tahap ini Jepang masih menjadi negara penerima ODA asing yang berasal dari Amerika Serikat dan Bank Dunia. Kedua, pada tahun 1954 saat Jepang bergabung dalam Colombo Plan, hal ini kemudian menandai dimulainya penyaluran bantuan luar negeri Jepang ke sejumlah negara di Asia. Ketiga, tahap yang terjadi pasca 1976, setelah Jepang masuk bergabung dalam OECD, Jepang menjadi lebih aktif dalam memberikan bantuannya. Adanya desakan dari negara-negara anggota OECD seperti Amerika Serikat menjadi salah satu penyebab keaktifan Jepang dalam program bantuannya. Keempat, terjadi pada tahun 1989, dimana Jepang telah menjadi salah satu pendonor terbesar, terutama untuk wilayah Asia, yang mencapai 66 persen dari total ODA yang disalurkan Jepang pada tahun 1994. (Raymon, 2009)

Kemudian, pada masa pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe, di mana sejak tahun 1954 ketika Jepang pertama kali menjadi sebagai negara donor paska Perang Dunia II, dengan fokus kebijakan bantuan luar negeri Jepang saat itu pada bidang ekonomi, pembangunan, dan infrastruktur mengalami perubahan seiring dengan pergantian kepemimpinan, arah politik luar negeri Jepang berubah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Dibawah kepemimpinan Shinzo Abe terjadi perubahan dalam kebijakan bantuan luar negeri Jepang, dengan memasukkan nilai-nilai universal seperti HAM, demokrasi dan lainnya dalam kebijakan bantuan luar negerinya.

Pada tahun 2006, di periode pertama pemerintahan Shinzo Abe menyatakan bahwa dukungan demokrasi akan menjadi pusat kebijakan luar negeri Jepang. Melalui Menteri Luar Negeri Jepang Taro Aso, saat itu menyampaikan pidato berjudul *Arc of Freedom and Prosperity : Japan's Expanding Diplomatic Horizons* pada seminar yang diselenggarakan oleh *the Japan Institute of International Affairs (JIJA)*. Pidato tersebut mendapat perhatian dengan menunjukkan keseriusan Jepang dalam memasuki wilayah yang selama ini diabaikannya (ICHIHARA, 2014). Jepang meluncurkan sebuah inisiatif untuk meningkatkan bantuan demokrasi Jepang dengan menciptakan "*Arc of Freedom and Prosperity*" di wilayah-wilayah dari Asia Timur Laut hingga Asia Tengah dan Kaukasus, Turki, Eropa Tengah dan Timur, dan negara-negara Baltik. Ini kemudian menandai pertama kalinya bahwa pemerintah Jepang secara terbuka menyatakan kesediaan untuk berkontribusi pada penciptaan sistem global norma-norma demokrasi. (Ichihara, 2013).

Bentuk bantuan demokrasi Jepang dalam hal ini lebih tertuju kepada penguatan demokrasi dan bantuan demokratisasi di negara-negara yang hendak melakukan transisi ke demokrasi. Jepang secara aktif membantu negara-negara berkembang yang mengambil langkah proaktif menuju demokratisasi dan mendukung upaya mereka untuk beralih ke sistem demokrasi yang mencakup bantuan pemilihan dan lainnya.

Jepang selama puluhan tahun cenderung menghindari isu yang berkaitan dengan nilai-nilai universal, karena itu merupakan isu-isu yang sensitif bagi negara-negara mitranya. Sebagaimana diketahui, isu demokrasi, hak asasi manusia, rule of law, atau kebebasan masih menjadi isu yang sensitif bagi banyak negara yang berada di bawah tekanan otoritarianisme sepanjang masa perang dingin, terutama negara-negara dikawasan Asia, yaitu Asia Timur dan Asia Tenggara.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengemukakan pertanyaan” *Mengapa Jepang merubah orientasi Official Development Assistance (ODA) dari infrastruktur ke demokratisasi pada masa pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe?* “

### C. Kerangka Teori

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, penulis menggunakan Teori Konstruktivisme sebagai kerangka teori. Dalam skripsi ini, penulis berasumsi bahwa individu mempunyai peran yang signifikan dalam hubungan internasional. Sebagai salah satu bagian dari pembuat keputusan atau kebijakan, individu dapat mempengaruhi hasil dari politik luar negeri. Politik luar negeri merupakan suatu strategi dalam menghadapi politik internasional yang saat ini terjadi. Sehingga, faktor individu akan mempengaruhi setiap kegiatan politik luar negeri dalam suatu negara. Dan dalam pembuatan suatu kebijakan, individu akan dipengaruhi oleh latar belakang, arus informasi yang diketahui, keinginan yang dimiliki serta tujuan yang hendak dicapai individu tersebut. Dalam buku “*The New Foreign Policy: Power Seeking in Globalized Era*”, Laura Neack mendefinisikan pemimpin sebagai individu atau non-individu yang memiliki peranan dalam pengambilan keputusan yang mana merespresentasikan sebuah negara. Dalam konteks Jepang, individu yang berperan sebagai pemimpin negara dan memiliki peran dalam pengambilan keputusan atas nama Jepang adalah Perdana Menteri Jepang, yaitu Shinzo Abe.

Teori Konstruktivisme berusaha menganalisis perubahan dalam politik luar negeri suatu negara berdasarkan adanya pengaruh dari hasil konstruksi sosial (gagasan, ide, norma) oleh individu maupun negara. Teori Konstruktivisme memfokuskan akan ide dan kepercayaan yang memberikan informasi bagi para aktor dalam kancah internasional dan pemahaman bersama yang terbentuk melalui proses interaksi

antar agen-agen (individu, negara, NGO) kemudian saling mempengaruhi satu sama lain, dimana ini merupakan hasil dari konstruksi sosial.

Sistem pemerintahan Jepang setelah konsepsi Konstitusi 1947 mengalami perubahan seiring dengan perkembangan demokrasi di Jepang. Proses pengambilan keputusan dan kebijakan Jepang mengalami perubahan dibandingkan sebelum Perang Dunia Kedua. Kaisar memiliki fungsi simbolik dan parlemen yang merupakan hasil dari pemilihan umum menjadi pusat pembuatan hukum dan kebijakan negara. Parlemen kemudian yang memilih Perdana Menteri Jepang, sehingga Perdana Menteri bertanggung jawab pada parlemen. Berbeda dengan Kongres AS yang memberikan kekuatan pada parlemen dalam menggerakkan perubahan institusional, parlemen Jepang tidak memiliki pengaruh yang sama dan tidak memberikan pengaruh tersebut bagi anggota parlemennya. Sehingga, kekuatan yang memiliki pengaruh dalam kebijakan terletak pada partai yang berkuasa atau paling berpengaruh di Jepang (Kinasih & Hapsari, MA, 2016). Dalam hal ini, LDP yang merupakan partai yang paling berkuasa dan pimpinan dari partai LDP yaitu Shinzo Abe, sehingga memiliki jalan untuk mempengaruhi perumusan suatu kebijakan. Dengan menjadi Perdana Menteri dari partai yang paling berkuasa, tentunya Abe memiliki kapasitas untuk membuat keputusan dan menentukan arah kebijakan luar negeri Jepang.

#### 1. Teori Konstruktivisme

Konstruktivisme bukanlah teori Hubungan Internasional tetapi teori sosial yang dikembangkan dalam studi ilmu sosiologi. Dalam studi hubungan internasional konstruktivisme digunakan untuk menjelaskan fenomena dunia pasca Perang Dingin. Dimana ketika teori realisme atau neorealisme dan liberalisme atau neoliberalisme pada saat itu hanya menjelaskan yang bersifat material seperti *Power* (Behraves, 2017). Kemunculan para pemikir konstruktivis ini dikarenakan ketidakpuasaan terhadap penjelasan dari teori

sebelumnya dalam menjelaskan realitas hubungan internasional. Pemikir-pemikir pada saat itu seperti Friedrich Kratochwill, Nicolas Onuf, dan Alexander Wendt, menganggap bahwa teori-teori yang membahas tentang *Power* dianggap tidak berkontribusi akan adanya kedamaian tetapi lebih condong untuk berperilaku agresif (VERDIANA, 2018). Konstruktivisme dalam hal ini digambarkan sebagai sebuah kerangka berpikir analitis dimana aktor dan faktor yang tidak teralu di perhatikan oleh teori hubungan internasional lainnya. Salah satu pemikir bernama Weber mengatakan bahwa perubahan dalam politik global bukan hanya dipengaruhi oleh aktor negara yang berdaulat, akan tetapi terdapat aktor lain yang dapat mempengaruhi hal tersebut seperti individu, kelompok elit, korporasi, organisasi internasional dan sebagainya. Pemikir-pemikir konstruktivis lebih melihat bagaimana persoalan dinamika perubahan internasional akan mempengaruhi kebijakan luar negeri negara.

Konstruktivisme menyatakan bahwa setiap hal yang ada di dunia merupakan akibat dari konstruksi sosial, dengan penanaman yaitu ide, norma, dan nilai, yang mana ketiga hal tersebut terkonstruksi menjadi sebuah pemikiran. Pemikiran dalam hal ini menjadi bagian dari konstruksi sosial, dengan dasar bahwa apa yang terjadi saat ini merupakan hasil dari konstruksi sosial yang terjadi sehingga hal ini dapat berubah atau tidak *absolute*.

Dalam konstruktivisme, kaum konstruktivis melihat dunia dengan cara pandang yang berbeda dengan teori-teori lainnya. Konsep-konsep yang menjadi dasar pemikiran kaum konstruktivis untuk memahami dunia juga sepenuhnya dapat dikatakan serapan dari ilmu sosiologi. Nilai, norma, ide, peraturan dan identitas adalah beberapa konsep kunci yang bisa digunakan para pemikir konstruktivis dalam menganalisis realitas internasional yang tidak mampu dijelaskan oleh teori-teori HI lainnya.



Ada tiga asumsi dasar pemikiran konstruktivis. Pertama, interaksi antar manusia, termasuk antar negara lebih ditentukan oleh faktor gagasan ketimbang material. Gagasan ini penting karena menentukan makna dari realitas material. Kedua, gagasan tersebut bersifat intersubyektif yakni menjadi semacam ‘pemahaman bersama’ (*shared understanding*) antar aktor. Konstruktivis menekankan pada *inter*-subyektivitas dimana makna ini dibentuk dari hasil interaksi sosial dan bukan persepsi individu semata. Ketiga, intersubyektivitas itu membentuk kepentingan dan tindakan aktor. Berbeda dengan realis dan liberal yang memandang kepentingan bersifat eksogen – sebagai pendorong tindakan – bagi konstruktivis kepentingan merupakan proses pembentukan dari gagasan. Tanpa gagasan tidak ada konsep kepentingan, tanpa kepentingan tidak ada tindakan yang bermakna (Abubakar Eby Hara, 2011).

Pemikiran konstruktivisme yang dipopulerkan oleh sejumlah nama besar, salah satunya Alexander Wendt, dalam tulisannya yang berjudul “*Anarchy is What States Make of It*” yang menantang asumsi realis dan liberal bahwa hubungan internasional lebih dipengaruhi oleh dimensi sosiologis bukanlah material. Alexander Wendt juga menyatakan bahwa, konstruktivisme lebih menekankan pada ide atau gagasan dalam memahami perilaku dunia internasional. Seperti halnya teori konstruktivisme yang lahir sebagai teori baru yang memperdebatkan teori sebelumnya yang hanya memahami situasi yang bersifat materil, konstruktivisme hadir untuk meyakini bahwa adanya negara, perang, sistem internasional, dan bentuk lain yang muncul dalam dunia internasional adalah hasil dari konstruk ide. Seperti dalam bukunya “*ideas all the way down*”, Wendt menyatakan bahwa ide atau gagasan akan mempengaruhi adanya pembentukan sistem dengan perilaku para aktornya. Konstruktivisme selain itu meyakini bahwa terkadang faktor ideasional (pemikiran) memiliki kekuatan yang lebih besar dari kekuatan materi (Alphatoda, 2015).

Dalam buku Alexander Wendt menjelaskan bahwa terdapat dua prinsip utama dalam konstruktivisme, pertama, adanya struktur dari asosiasi manusia bukan hanya ditentukan oleh kekuatan material namun adanya *shared ideas* yang mana dilakukan oleh interaksi para aktor. Kedua, bahwa adanya identitas dan kepentingan aktor bukan dibangun dengan sendirinya namun dibentuk atas gagasan atau ide dengan tujuan tertentu (Hadiwinata, 2017). Wendt menganggap bahwa menjunjung tinggi adanya peran identitas itu perlu sebagai salah satu faktor membentuk kepentingan dari perilaku negara terhadap dinamika agen dan struktur. Asumsi dasar Wendt lainnya dalam "*Social Theory of International Politics*" menerangkan terdapat tiga klaim utama yang menjadi esensi teori konstruktivisme : "(1) *state are the principal units of analysis in international political theory*; (2) *The key structures in the state system are intersubjective rather than material*; (3) *state identities and interest are important part constructed by these social structures, rather than given exogenously to the system by human nature or domestic politics*"

Dalam klaim konstruktivisme diatas, Wendt menekankan pentingnya variable yang terbentuk secara sosial dalam analisa fenomena hubungan internasional. Dengan kata lain, identitas yang terbentuk melalui proses interaksi antar negara inilah yang kemudian mendasari perilaku aktor politik internasional dalam menentukan sebuah kebijakan baik dalam negeri maupun luar negeri.

Perkembangan konstruktivisme dikategorikan dalam tiga kelompok besar, yaitu:

1. *Systemic Constructivism*

Pendekatan ini lebih banyak mengadopsi pandangan neorealisme yakni melihat interaksi antar unit internasional/states. Mereka mengabaikan struktur yang ada pada level domestik. Fokus kajiannya adalah bagaimana munculnya norma, nilai dan identitas bersama dalam bentuk

interaksi antar negara seperti kerjasama di dalam organisasi internasional, kerjasama regional dan juga konflik antar negara.

## 2. *Unit-level constructivism*

Pendekatan ini adalah kebalikan dari systemic constructivism. Fokus kajiannya adalah hubungan antara entitas sosial di tingkat domestik dengan norma-norma hukum, identitas dan kepentingan sebuah negara. Dimana aliran ini diwakili oleh Peter Katzenstein dalam melihat tingkat unit di sini berkonsentrasi pada hubungan antar sosial domestik, norma, hukum, identitas dan kepentingan negara serta strategi keamanan negara. Namun, level unit disini sebagai negara tidak begitu penting mengingat bahwa ideasional atau norma individu bisa berperan lebih penting dalam domestik. Dalam hal ini karakter individu dapat mempengaruhi interaksi sosial di dalam negara. Sehingga individu dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara

## 3. *Holistic Constructivism*

Berbeda dengan Sistemik dan Unit-level Constructivism, Holistic Constructivism tidak memisahkan analisa sektor domestik dan internasional. aliran ini diwakili oleh pemikir John G. Ruggie dan Friedrich Kratochwil yang menjembatani antara aspek internasional dan domestik Perspektif ini lebih melihat domain domestik dan internasional sebagai sebuah kesatuan yang berinteraksi satu sama lain dalam proses pembentukan identitas dan nilai. Fokus utama kajiannya adalah menganalisis perubahan yang terjadi di dalam sistem internasional

Teori Konstruktivisme dalam politik luar negeri digunakan untuk memahami pembuatan keputusan dalam kebijakan luar negeri suatu negara yang dipengaruhi atau terkonstruksi oleh lingkungan, norma, ide dan gagasan, Teori ini lebih terfokus pada konstruksi sosial yang dibentuk yang merujuk pada aktivitas hubungan internasional.

Konstruktivisme dalam menganalisa kebijakan luar negeri berangkat dari asumsi bahwa dunia hanya merupakan hasil konstruksi dari interaksi aktor yang sifatnya dinamis. Dalam pembuatan kebijakan luar negeri setidaknya terdapat delapan asumsi :

*Pertama* adalah bahwa motivasi dari tindakan-tindakan para aktor dalam hubungan internasional merupakan faktor yang penting, karena lingkungan sosial pun pada umumnya merupakan hasil konstruksi manusia sehingga bersifat intersubjektif

*Kedua* konstruktivisme menekankan pada upaya dalam menghubungkan struktur dan lembaga-lembaga serta agen-agen yang berfokus pada teori. Hal berdasarkan pada anggapan bahwa struktur dan lembaga memiliki hubungan saling ketergantungan satu sama lain.

*Ketiga*, konstruktivisme menekankan terhadap peranan norma dalam pola perilaku masyarakat di lingkungan sosial, termasuk negara dalam lingkungan internasional. Asumsi ini berangkat berdasarkan pada pencapaian kebijakan luas negeri untuk kepentingan nasional negara dan juga pentingnya kebijakan tersebut untuk dapat diterima oleh masyarakat internasional.

*Kelima*, penekanan terhadap peran institusi baik dalam bentuk formal maupun informal terhadap dinamika hubungan internasional.

*Keenam*, para teoritis konstruktivisme menganalisis segala macam yang berkaitan dengan proses institusionalisasi kebijakan seperti pengembangan pola sosialisasi di dalamnya.

*Ketujuh*, asumsi bahwa dalam teori ini tidak terfokus pada kepentingan-kepentingan sebab perannya sebagai penengah. Konstruktivis lebih fokus kepada analisis bagaimana kepentingan dan kebijakan yang dibuat beserta peranan

institusi, norma, serta ide-ide dalam proses pembuatan kebijakan.

*Kedelapan*, konstruktivisme percaya bahwa memahami identitas, kepentingan, serta perbaikan lembaga-lembaga birokrasi yang disertai dengan norma-norma yang berlaku dijadikan sebagai alat komunikasi terhadap suatu wacana.

Selain delapan asumsi tersebut, dalam kajian konstruktivisme terdapat empat tema besar yaitu negara, kekuasaan, institusi dan tatanan dunia. Dalam kaitannya dengan politik luar negeri, teori konstruktivisme lebih memusatkan pada hal-hal yang mempengaruhi pengambilan kebijakan baik itu aktor individu maupun negara serta menjelaskan mengapa terjadi perubahan haluan dalam pengambilan kebijakan pada kondisi dan situasi tertentu. Disebutkan sebelumnya dalam perkembangan konstruktivisme melihat bahwa level individu juga memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan, sehingga individu dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara.

Politik luar negeri sering dikaitkan dengan teori yang ada dalam hubungan internasional, seperti teori realis, idealis, maupun konstruktivisme. Beberapa teori dalam studi hubungan internasional tersebut sering digunakan untuk menganalisa politik luar negeri suatu negara yang berkaitan dengan kepentingan negara tersebut.

Teori Konstruktivisme berusaha memahami perubahan dalam politik luar negeri berdasarkan pada adanya pengaruh dari gagasan, ide, norma, nilai dan identitas oleh negara atau individu tersebut. Teori Konstruktivisme menyebutkan bahwa konstruksi sosial seperti norma, gagasan, ide, dan nilai dalam lingkungan individu maupun negara dapat mempengaruhi tingkah laku atau langkah yang diambil oleh suatu aktor, baik itu negara atau individu.

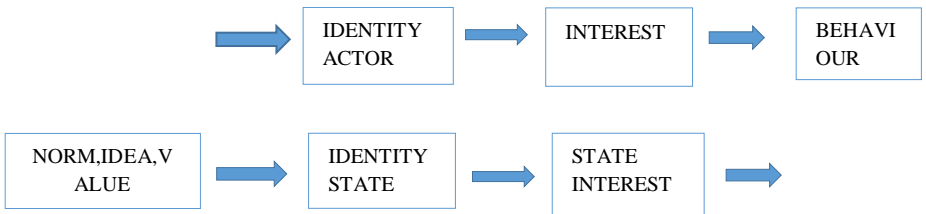
Dalam mewujudkan politik luar negeri, kebijakan luar negeri suatu negara akan selalu berubah sesuai dengan kondisi

dan kebutuhan. Kebijakan luar negeri Jepang dalam mewujudkan politik luar negerinya mengalami perubahan pada era pemerintahan Shinzo Abe. Pada dasarnya sejarah juga menjadi salah satu yang mempengaruhi politik luar negeri Jepang saat ini. Namun, dalam melihat perubahan dalam kebijakan bantuan luar negeri Jepang aktor negara maupun individu dalam sudut pandang konstruktivis memiliki peran dalam perubahan politik luar negeri negara tersebut.

Shinzo Abe ingin membentuk identitas baru Jepang dengan image “*peaceful*”, sehingga di masa pemerintahan Shinzo Abe prinsip politik luar negeri Jepang yaitu menjaga kawasan di Asia dan sekitarnya, mendukung dan berupaya menjaga politik serta keamanan disekitar kawasan sehingga menjadi lebih kuat dan damai. Tak hanya itu, politik luar negeri Jepang juga memfokuskan pada keinginan Shinzo Abe untuk meningkatkan nilai-nilai universal seperti demokrasi dan HAM bersama dengan anggota ASEAN, melakukan kerjasama untuk menjamin kebijakan laut bebas tanpa dengan ancaman militer dan menjaga obyek vital, dan menjaga kemitraan ekonomi dengan meningkatkan kerjasama dibidang investasi revitalisasi perekonomian. (Maharani & Faqih, 2013)

Konstruktivisme berusaha menjelaskan aspek yang dapat mempengaruhi politik luar negeri. Berbeda dengan teori realis dan idealis yang memfokuskan pada tujuan politik luar negeri suatu negara yang tidak lepas dengan kepentingan nasional negara tersebut. Fenomena adanya perubahan signifikan dalam kebijakan luar negeri Jepang dianalisa dalam kerangka teori konstruktivisme, dimana teori ini menyatakan bahwa perilaku negara selayaknya dipahami melalui substansi atau ide yang terbentuk secara sosial. Wendt menyatakan perubahan dalam kancah internasional merupakan dari konstruksi sosial yang dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara dalam hal ini yaitu Jepang. Tak hanya itu, Alexander Wendt menekankan juga identitas sebagai sumber yang mempengaruhi kepentingan dan kepentingan merupakan sumber dasar kebijakan luar negeri. Konstruktivisme

menyatakan bahwa semua pemikiran berasal dari konstruksi sosial dimana ini akan merujuk kepada pembentukan identitas suatu individu atau negara. Konstruksi sosial dalam hal ini merupakan hasil dari norma, nilai dan ide yang kemudian membentuk identitas aktor atau negara kemudian ke tahap kepentingan dan berakhir kepada kebijakan luar negeri suatu negara atau perilaku aktor tersebut.



***Bagan 1. Analisa Kebijakan Luar Negeri Teori Konstruktivisme***

***NORM, IDEA, VALUE : Dioalah sendiri dari berbagai sumber tentang konstruktivisme***

Gambar 1 menunjukkan pendekatan analisa dari pemikir konstruktivis, dimana kaum konstruktivis cenderung untuk menganalisa lebih jauh dari asal mula kepentingan dan kebijakan luar negeri. Seperti yang tergambar dari skema tersebut, dasar perspektif konstrutivis terhadap pembuatan kebijakan suatu negara dibangun dari basis konstruksi sosial (norma, ide, nilai) yang kemudian membentuk identitas aktor baik negara maupun individu. Identitas aktor tersebut berasal dari lingkungan sosial yang memberikan pengaruh terhadap gagasan individu maupun negara. Identitas kemudian membentuk kepentingan, dan kepentingan akan menentukan perilaku, aksi, atau kebijakan dari aktor.

Dalam hal ini, Shinzo Abe yang merupakan aktor individu yang dapat mempengaruhi perubahan dalam politik luar negeri Jepang, dengan identitas yang dimilikinya. Identitas yang dimilikinya tersebut tidak muncul secara alamiah

melainkan terbentuk melalui konstruksi sosial (norm, values, idea) dari pengaruh lingkungan sosialnya. Dalam hal ini, keputusan Shinzo Abe dalam kebijakan bantuan luar negeri Jepang dengan memasukkan nilai-nilai universal seperti demokrasi dan HAM yang telah menjadi salah satu prinsip politik luar negeri Jepang saat ini, dipengaruhi oleh latar belakang keluarga dan karir perpolitikannya.

Shinzo Abe berasal dari keluarga politisi, dimana Kakek Shinzo Abe, Nobuseke Kishi merupakan Perdana Menteri Jepang yang menjabat pada tahun 1957-1960 dan ayahnya Shintaro Abe merupakan Menteri Luar Negeri Jepang yang menjabat pada tahun 1982-1986. Tidak hanya itu, Shinzo Abe bergabung dengan sebuah partai yaitu Partai Demokratik Liberal (*Liberal Democratic Party* atau LDP) yang dibentuk pada tahun 1955, dimana partai ini merupakan partai dominan di Jepang (Sendra, 2014). LDP merupakan gabungan partai Liberal dan Demokratik, yang menjanjikan negara demokrasi sejahtera yang sempurna, dengan didedikasikan pada pencapaian perdamaian dan kebebasan dan harmonisasi kepentingan umum dan kreatifitas individu.

Dalam politik luar negeri Jepang, landasan pokok politik luar negerinya adalah untuk memberikan kontribusi kepada perdamaian dan kemakmuran dunia dengan membina keamanan dan kesejahteraan. Keinginan berdasarkan pada pasal 9 Konstitusi Jepang yang mana dalam isinya merumuskan tentang penolakan terhadap perang. Keinginan Jepang untuk memberikan kontribusi dalam perdamaian dan kemakmuran dunia ini dapat dilihat dari politik luar negeri Jepang saat ini di era pemerintahan Shinzo Abe. Dari sudut pandang konstruktivis, langkah Shinzo Abe dalam perubahan kebijakan bantuan luar negerinya juga dipengaruhi oleh identitas negara Jepang sendiri yang tertuang dalam landasan pokok politik luar negeri Jepang. Hal ini menekankan bahwa struktur gagasan dan norma dalam politik luar negeri suatu negara, dalam hal ini politik luar negeri Jepang dapat mempengaruhi Shinzo Abe dalam menciptakan prinsip politik luar negerinya.



Konstruktivisme artinya mengkonstruksi sesuatu. Dalam melihat fenomena kebijakan luar negeri Jepang. Jepang sebagai negara adidaya (yang mempunyai power) dan identitas sebagai negara demokrasi tertua di Asia, sekaligus juga merupakan negara dengan sistem ekonomi pasar tertua di Asia, Jepang kini telah bertransformasi sebagai stabilisator internal kawasan dengan membawa ide baru terkait demokratisasi. Dalam hal ini, Jepang memandang demokrasi bukan suatu sistem melainkan sebuah nilai, walaupun Jepang merupakan negara monarki konstitusional namun Jepang merupakan salah satu negara demokrasi dengan menganut sistem monarki parlementer yang multipartai dimana kaisar adalah simbol negara dan perdana menteri adalah kepala kabinet legislatif dan kepala negara atau eksekutif. Jepang menerapkan nilai demokrasi dalam mendukung perekonomiannya dan hal itu membawa hasil yang positif dengan pertumbuhan perekonomian yang cukup stabil dalam penerapannya. Dibawah pemerintahan Shinzo Abe, Jepang menyadari pentingnya meningkatkan stabilitas antar kawasan sehingga Jepang memperkenalkan ide untuk mengembangkan demokrasi sebagai instrumen penting dalam diplomasi internasional, dimana kemudian melakukan reformasi pada strategi bantuan luar negeri (*Japanese ODA*) dengan mulai meningkatkan jumlah bantuan luar negeri untuk sektor *governance and civil society* (Rahman, 2015).

Perspektif konstruktivisme dalam menjelaskan analisis kebijakan luar negeri Jepang berangkat dari asumsi bahwa dunia merupakan hasil konstruksi sosial yang sifatnya dinamis. Adanya perubahan fenomena hubungan internasional akan mempengaruhi kebijakan suatu negara. Perubahan pada lingkungan strategis dan hubungan internasional dewasa ini melahirkan isu-isu baru yang semakin kompleks dan membutuhkan pendekatan alternatif bagi setiap negara, tidak terkecuali Jepang.

Perubahan dalam kebijakan luar negeri Jepang memiliki kepentingan bagi negaranya. Seperti diketahui kebijakan luar negeri adalah salah satu alat yang digunakan untuk mencapai kepentingan nasional. Dalam hal ini, Jepang melalui *Official Development Assistance* (ODA) kepentingannya berada pada keamanan negara dengan stabilitas kawasan di Asia. Jepang pasca perang dunia II tidak diperbolehkan aliansinya Amerika Serikat untuk memperkuat angkatan militernya, yang menyebabkan alokasi dana untuk militernya hanya sekitar 1% dari APBN negaranya (Tular, Widyanugraha, & Priadarisini). Maka dari itu, untuk mempertahankan posisinya di Asia, Jepang lebih berfokus melakukan kerjasama dengan negara lain. Hal ini yang kemudian menjadikan alasan Jepang dengan giat melakukan berbagai kerjasama dengan negara-negara sekitarnya. Sehingga pemberian bantuan yang terwujud dalam kebijakan luar negeri Jepang yaitu, ODA merupakan salah satu cara Jepang untuk mencapai kepentingan nasionalnya.

#### **D. Hipotesa**

Jepang memasukkan nilai-nilai universal seperti HAM dan demokrasi dalam kebijakan bantuan luar negerinya yaitu *Official Development Assistance* (ODA) karena adanya :

1. Perubahan nilai pembangunan dalam tatanan dunia internasional yang sebelumnya berdasarkan pembangunan ekonomi menjadi pembangunan berkelanjutan melalui program SGD's.
2. Perubahan atau pengaruh nilai dan pandangan Shinzo Abe terhadap politik luar negeri Jepang dengan menggunakan ODA sebagai upaya untuk menjaga stabilitas kawasan dan perdamaian di kawasan Asia.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulis menulis skripsi ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perkembangan ODA (*Official Development Assistance*) Jepang yang sebelumnya masih berfokus pada bantuan infrastruktur yang kemudian saat ini memasukkan nilai-nilai universal dalam bantuan kebijakan luar negerinya.
2. Alasan Jepang memberikan bantuan demokratisasi di wilayah Asia melalui ODA (*Official Development Assistance*) pada masa pemerintahan Shinzo Abe.

## **F. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu dengan menggunakan studi kasus dan teori yang telah dipaparkan sebelumnya. Penelitian ini bersifat analisis menjelaskan tindakan yang diambil oleh subjek.

Disamping itu, untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan oleh penulis secara luas dan lengkap, sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua yaitu, data primer dan data sekunder. Sumber data primer penulis dapatkan dari dokumen resmi negara melalui website resmi *Ministry of Foreign Affairs of Japan* (<https://www.mofa.go.jp/policy/oda/index.html>), sedangkan sumber data sekunder dengan pola pengolahan data yang diperoleh dengan cara studi literature menggunakan metode *Library Research* dari berbagai literature, seperti buku, jurnal, dokumen, artikel, kemudian media massa cetak maupun online, data-data pada website resmi, dan berbagai sumber yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis tentang *Dukungan demokratisasi Jepang melalui Official Development Assistance (ODA) pada pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe*.

## **G. Jangkauan Penelitian**

Dalam penulisan ini, penulis membatasi ruang lingkup penulisan dan menggunakan era pemerintahan. Hal ini dilakukan untuk memfokuskan pembahasan tentang pokok

permasalahan yang diangkat. Dengan diterapkannya batasan ruang lingkup pembahasan, penulis hanya akan memfokuskan pada era pemerintahan Shinzo Abe.

## **H. Sistematika Penulisan**

**Bab I** : Merupakan bab pendahuluan yang didalamnya terdapat unsur-unsur metodologi karya ilmiah yang meliputi; Latar Belakang Masalah, Konsep, Hipotesa, Metode Penelitian, Jangkauan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **Bab II : OFFICIAL DEVELOPMENT ASISSTANCE SEBAGAI ALAT POLITIK LUAR NEGERI JEPANG**

Pada bab ini akan membahas mengenai sejarah bantuan luar negeri Jepang dan doktrin-doktrin dari setiap perdana menteri pada eranya yang saat itu telah memainkan kunci dalam kebijakan bantuan luar negeri Jepang di wilayah Asia terutama Asia Tenggara.

### **Bab III : PERUBAHAN ORIENTASI ODA JEPANG**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai ODA (*Official Development Asisstance*) Jepang yang memasukkan nilai demokrasi dalam kebijakan bantuan luar negerinya, sehingga memaparkan evolusi ODA Jepang. Dalam bab ini juga akan dipaparkan mengenai pemahaman bentuk demokrasi Jepang.

### **Bab IV : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JEPANG TERHADAP PERUBAHAN ORIENTASI ODA JEPANG DARI INFRASTRUKTUR KE DEMOKRATISASI**

Pada bab ini akan membahas mengenai alasan perubahan fokus bantuan luar negeri Jepang karena adanya perubahan nilai dalam tatanan dunia internasional dan perubahan pandangan dan nilai Shinzo Abe terhadap politik luar negeri Jepang. Sehingga mendorong Shinzo Abe dalam mengubah arah kebijakan bantuan luar negeri Jepang atau ODA (*Official Development Asisstance*).

**Bab V** : Kesimpulan berupa rangkuman dari bab I-IV beserta sub-bab yang telah dijelaskan terkait dengan perubahan orientasi ODA (*Official Development Assistance*) Jepang dan pengaruh pandangan Shinzo Abe dan tatanan dunia internasional terkait perubahan tersebut.